

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki luas mangrove yang paling besar, yaitu 3.112.989 ha atau 22,6% total luas mangrove dunia bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan Australia (7,1%) dan Brazil (7,0%) (Dharmawan dan Pramudji, 2014).

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain yaitu, sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan dari segi fungsi ekonominya antara lain yaitu, penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit (Wiyanto dan Faiqoh, 2015).

Mangrove memegang peranan penting dalam melindungi daratan dari abrasi oleh gelombang air laut, dan juga berfungsi sebagai peredam alami dari terjangan tsunami. Ekosistem mangrove juga memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, baik ditinjau secara fisik dan kimia. Secara fisik ekosistem mangrove dapat menjadi garis pantai agar tidak terjadi abrasi, menahan sedimen, tiupan angin, dan menyangga rembesan air laut kedarat. Sedangkan secara kimia ekosistem mangrove mampu mengolah limbah agar kemungkinan pencemaran sedikit dan yang paling utama adalah sebagai penghasil oksigen (Alwi *et al.*, 2019).

Areal penyebaran hutan mangrove yang terdata di Sumatera Barat yaitu seluas 39.670 ha, yang tersebar pada kabupaten/kota yang memiliki pantai seperti Kabupaten Pasaman Barat 6.046,50 ha, Kabupaten Agam 313,50 ha, Kabupaten Pesisir Selatan 325,00 ha, Kabupaten Padang Pariaman 200,00 ha, Kota Pariaman 65,00 ha, Kota Padang 120,00 ha, dan 32.600 ha dan dipesisir gugusan Pulau Kabupaten Kepulauan Mentawai (Kamal, 2011).

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2015) menunjukkan bahwa total luas ekosistem mangrove di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat 35.214,39 ha. Wilayah kabupaten/kota pesisir yang memiliki ekosistem mangrove terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 26.619,50 ha, Kabupaten Pasaman Barat 6.273,50 ha, Kabupaten Pesisir Selatan 2.549,55 ha, Kota Padang 1.250,16 ha, Kabupaten Padang Pariaman 190,00 ha, dan sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas ekosistem mangrove terkecil yaitu Kota Pariaman dengan luasan mangrove 18,25 ha.

Populasi hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini berdasarkan data tahun 2005 dan 2015 mengalami peningkatan luasan hutan mangrove, namun ada juga sebagian wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan yang kondisi hutan mangrovenya mengalami kerusakan yang diakibatkan meningkatnya aktifitas masyarakat yang semakin pesat, dan banyak terjadi eksploitasi dikawasan hutan mangrove.

Sebagian besar mangrove di Pulau Kapo-Kapo Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong dalam keadaan baik, namun ada juga sebagian dari luasan mangrove tersebut yang mengalami kerusakan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan dari kawasan mangrove tersebut yaitu, eksploitasi, perluasan wilayah, dan faktor alami. Maka dari data dan kondisi keadaan kawasan mangrove tersebut, diperlukan penelitian ini yang berjudul Struktur Komunitas Mangrove Di Pulau Kapo-Kapo Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

1. Mengidentifikasi jenis mangrove di Pulau Kapo-Kapo Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengidentisikasi struktur komunitas mangrove di Pulau Kapo-Kapo Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang meliputi jenis, kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting, dan basal area mangrove.

1.2.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kawasan pesisir daerah penelitian.